Partai Demokrat Boyolali Dukung Anies

BOYOLALI (KR) - Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Boyolali, Dwi Purwanto menyikapi kebijakan yang di putuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat. Ajakan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono tentang Pilpres 2024, bahwa Kader Partai Demokrat Dukung Sepenuhnya Anies Baswedan sebagai Calon Presiden dalam pemilu 2024. Dwi Purwanto menegaskan, pihaknya akan loyal pada keputusan dan kebijakan Ketua Umum bahwa Partai Demokrat dalam Pilres 2024 mendukung sepenuhnya. "Hal ini setelah Anies Baswedan menjalin komunikasi intens dengan AHY terkait dukungan pada Pilpres 2024, dan berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrat, Kamis (2/3)," tegasnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut berkunjung ke Kantor DPP Partai Demokrat hari ini Kamis 2 Maret 2023 yang diterima langsung Ketua Umum bersama jajaran pengurus. Setiba di Kantor DPP Partai Demokrat, Anies Baswedan berjalan didampingi sejumlah pengurus Demokrat menuju panggung yang sudah disediakan di halaman kantor DPP Demokrat. Selama Anies dan AHY berjalan, massa simpatisan dan kader Demokrat yang sudah memadati halaman kantor DPP Demokrat tak henti-hentinya menyanyikan yel-yel dukungan kepada Anies dan AHY." ujar Dwi Purwanto. **(R-3)-f**

KR-Mulyawan

Pertemuan AHY dengan Anies Baswedan.

Klaten Masuk 10 Besar Nasional Lomba Desa Pangan Aman

KLATEN (KR) - Kabupaten Klaten masuk dalam nominasi 10 besar dalam Lomba Desa pangan Aman tingkat nasional. Tim penilai lomba desa pangan aman nasional mengunjungi Desa Randusari, Kecamatan Prambanan, Klaten, yang masuk dalam 10 besar nasional lomba tersebut, Kamis (2/3). Visitasi digelar untuk memastikan kesesuaian dokumentasi yang dipresentasikan pada penilaian sebelumnya.

Tim penilai lomba desa pangan aman terdiri dari beberapa instansi; Kemenko PMK, Bapanas, Kemendagri, BKKBN, Kemendes PDTT, Kementan, dan BPOM. Tim tersebut melakukan kunjungan ke titik-titik penilaian sesuai dengan dokumentasi yang disampaikan Desa Randusari. Di antaranya produksi olahan makanan UMKM setempat, hingga toko kelontong yang dikelola oleh masyarakat.

Tim penilai lomba desa pangan aman sekaligus Fungsional Utama BKKBN, Dwi Listyawardani mengatakan, lomba ini digelar untuk menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pangan yang aman. "Pengendalian pangan yang mengandung bahan dan zat berbahaya yang paling efektif adalah oleh masyarakat. Caranya dengan masyarakat mengenali ciri pangan yang mengandung bahan dan zat berbahaya," kata Dwi Listyawaradani. **(Sit)-f**

KR-Sri Warsiti

Visitasi tim penilai lomba di Desa Randusari.

Kepercayaan Merek Halal Masih Rendah

SALATIGA (KR) - Dosen Universitas Widya Dharma (Unwidha) Klaten, Arif Julianto mengungkapkan merek halal masih dalam kategori kepercayaan rendah dan kategori produk low-involvement. Hal tersebut ditulisnya pada disertasi dalam meraih jenjang doktor pada Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UKSW Salatiga, pada Yudisium Program S3 Manajemen. Ia mengangkat judul disertasi, Niatan Beli Merek Halal dalam Kaitannya dengan Atribut Halal Kepercayaan dan Keterlibatan Produk, di Ruang Probowinoto Gedung G UKSW Salatiga, Kamis (2/3). Ia juga menegaskan dengan penguatan gaya hidup mengkonsumsi merek halal asli buatan Indonesia, dapat menjadi keunggulan kompetitif sistem syariah. Hal ini dapat menjadikan Indonesia sebagai pelaku utama menuju visi kiblat ekonomi syariah dunia di masa mendatang. ìPenelitian kami lakukan dengan teknik purposive sampling dan mendapatkan sejumlah 400 responden yang memiliki motivasi kuat untuk mengonsumsi merek halal di wilayah Solo Raya,î kata Arif Julianto.

Lebih lanjut, Arif Julianto juga menyatakan bahwa pemegang merek halal di Indonesia harus terus melakukan market penetration (ekspansi pasar) pada wilayah di mana konsumen memiliki tingkat religiusitas terpersepsi tinggi. "Pihak pemegang merek halal harus mampu menjadikan produknya mudah dijangkau, memiliki harga jual kompetitif, serta selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di seluruh wilayah baik perkotaan maupun pedesaan," terang dosen Prodi Manajemen di Universitas Widya Dharma (UNWIDHA) Klaten. Arif Julianto dinyatakan lulus dengan sangat memuaskan pada program Doktor Manajemen (FEB) UKSW Salatiga. Ketua Program Studi (Kaprodi) DM FEB UKSW Salatiga Albert Kriestian NAN MM PhD menyebutkan Arif Julianto merupakan lulusan ke-52 Prodi DM dan berhasil meraih predikat kelulusan sangat memuaskan. ìTema disertasinya menarik dan relevan dengan perkembangan produk halal yang kian meningkat. **(Sus)-f**

Diperiksa, Aktor KKN Seleksi Penerimaan Bintara

SEMARANG(KR) - Lima oknum anggota Polda Jateng diduga menjadi aktor KKN dalam proses seleksi penerimaan Bintara Polri Gelombang pada tahun 2022. Kelima oknum itu akibat ulahnya akan segera diajukan ke sidang kode etik untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol M Iqbal Alqudusy kepada wartawan, Jumat(3/3) mengatakan kelima oknum itu tersebut telah menjalani pemeriksaan intensif dari penyidik Bidpropam dan berkas pemeriksaannya secara lengkap. Kelima orang terdiri dari dua berpangkat Kompol, satu AKP dan tiga Bintara. Mereka Kompol AR, Kompol KN, AKP CS, Bripka Z dan Brigadir EW. "Mereka diduga terlibat KKN percaloan atau aksi KKN dalam tes masuk Bintara Polri tahun 2022 atas inisiatif pribadi", ucapnya.

Aksi mereka, lanjut Kabid Humas, terpergok oleh operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan Divisi Propam Mabes Polri dan langsung diperiksa secara intensif.

"Kemudian penyidikan atas keterlibatan mereka dilimpahkan ke Bidpropam Polda Jateng dan saat ini proses berkas perkaranya sudah tuntas. Siap disidangkan secara kode etik," tambahnya.

Terkait desakan LSM agar penanganan kasus ini dikawal secara ketat, Kabidhumas mengatakan pihaknya amat mendukung dan siap menyampaikan hasilnya secara terbuka.

"Silahkan dikawal dan dipantau. Yang jelas kelima oknum anggota tersebut sudah menjalani pemeriksaan dan akan segera disidangkan secara kode etik dalam waktu dekat", ucapnya sembari mengatakan hasilnya nanti akan disampaikan para rekan-rekan media. **(Cry)-f**

KR-Karyono

Kombes Pol M Iqbal

Bawaslu Temukan Joki Coklit di 2 Kecamatan

MAGELANG (KR) - Bawaslu Kabupaten Magelang menemukan praktik joki Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih di dua kecamatan yakni Kecamatan Candimulyo, dan Kecamatan Dukun. Adapun coklit di balik meja ditemukan di Kecamatan Mungkid.

Kordiv Pencegahan Partisipasi masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Magelang Sumarni Aini Chabibah mengungkapkan coklit harus dilakukan oleh petugas yang berhak. Yakni Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih) yang sudah dilantik dan mendapatkan SK resmi untuk menjalankan tugasnya.

"Kami menemukan ada coklit yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Coklit harusnya dilakukan petugas yang dilantik dan mendapatkan SK resmi untuk menjalankan tugasnya. Ini termasuk kategori joki coklit," kata Aini, Jumat (3/3). Aini menegaskan proses coklit merupakan tahapan penting dalam proses penyusunan daftar pemilih. Warga negara yang memenuhi ketentuan harus masuk daftar pemilih sedangkan warga yang tidak berhak tidak boleh dimasukkan daftar pemilih. Untuk itu, peran pantarlih sangat besar dalam memastikan kualitas dan validitas data pemilih karena data ini akan menjadi bahan penyusunan DPS.

Menurut Aini atas temuan ini, pengawas pemilu sudah memberikan saran perbaikan ke jajaran KPU secara berjenjang. Saran perbaikan tersebut berupa coklit ulang di TPS tempat joki melakukan pencocokan data pemilih dari rumah ke rumah. Disebutkan Coklit dilakukan sejak tanggal 12 Februari 2023 hingga 14 Maret 2023. Selama kurun waktu 30 hari jajaran pengawas pemilu melakukan pengawasan melekat poses pelaksanakan coklit tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan pantarlih bekerja sesuai aturan perundang-undangan. "Sebagai langkah pencegahan Bawaslu Kabupaten Magelang sebelumnya sudah berkirim surat imbauan kepada jajaran KPU untuk bekerja sesuai dengan aturan," kata Aini.

Joki coklit pertama ditemukan di TPS 08, Desa Mejing Kecamatan Candimulyo atas laporan Panwaslu Desa Mejing kepada Panwaslu Candimulyo. Kordiv Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat Panwaslucam Candimulyo kemudian mengumpulkan data dan melakukan klarifikasi temuan tersebut. "Kami sudah melakukan klarifikasi kepada Pantarlih 08 (RD) pada Selasa 28 Februari 2023. Klarifikasi ini bertujuan untuk mengkonfirmasi kebenaran temuan Panwasdes," kata Ketua Panwaslucam Candimulyo Arief Budianto.

Arief mengatakan pihaknya kemudian memberikan saran perbaikan agar TPS 08 khususnya di RT 009 dilakukan Coklit ulang. Dikatakan bahwa PPK dan Panwaslu sebagai penyelenggara tentu harus memiliki spirit yang sama. Yaitu mensukseskan seluruh tahapan Pemilu.

Atas saran perbaikan ini, Ketua PPK Candimulyo Ahmad Syaefudin menyambut baik dan siap untuk segera mengkoordinasikan dengan PPS Desa Mejing. "Saran perbaikan ini adalah bagian dari cara Panwaslu mendukung kerja-kerja PPK Candimulyo,î jelas Arief.

Ketua Panwascam Dukun Aryanto mengungkapkan pihaknya juga menemukan praktik joki coklit di TPS 18 Desa Banyudono. Disebutkan Panwasdes dan Panwaslucam Dukun juga menemukan pantarlih sudah menempel stiker bukti coklit meski belum melakukan coklit.

Kasus tersebut terjadi di TPS 06 Desa Sengi, TPS 03 Desa Sewukan, dan TPS 05 Desa Sumber. "Kami juga menemukan anggota Polri aktif dimasukkan form bukti coklit sebagai pemilih di TPS 06 Desa Sumber. Padahal TNI/Polri kan tidak punya hak pilih dalam pemilu,î kata Aryanto.

Kasus berbeda terjadi di Kecamatan Mungkid di mana coklit dilakukan di balik meja. Temuan ini berawal laporan Panwasdes bahwa ada pantarlih yang tidak mencocokan KK/KTP saat melakukan coklit. Warga hanya diminta tanda tangan di salah form yang dibawa pantarlih.

Kordiv Hukum, Pencegahan, Humas, dan Parmas Panwaslucam Mungkid Nur Setyo Iswandani menambahkan pihaknya kemudian mengumpulkan informasi untuk memperkuat temuan tersebut. "Masyarakat saat dikonfirmasi Panwasdes dan Panwaslucam membenarkan hanya diminta tanda tangan form saja. Kami sudah berkoordinasi dengan PPK Mungkid atas temuan ini," kata Nur Setyo.

Ketua Bawaslu Kabupaten Magelang Muhammad Habib Shaleh menambahkan bahwa seluruh jajaran Bawaslu dari tingkat kabupaten, kecamatan hingga panwasdes bekerja keras melakukan pengawasan seluruh tahapan Pemilu 2024, termasuk pemutakhiran daftar pemilu. Ia menilai DPT yang berkualitas menjadi langkah awal untuk mensukseskan Pemilu 2024. **(Bag)-f**

Pemerintah Lakukan Revitalisasi 7 SMK di Jateng

SOLO (KR) - Untuk mewujudkan program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan (SMK PK), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Pemprov Jateng dan Konsorsium Pengusaha RI Peduli Vokasi secara resmi merevitalisasi tujuh SMK di Provinsi Jateng. Peresmian revitalisasi ini ditandai dengan pemukulan gong dan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jateng Ganjar Pranowo didampingi DirekturJenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati dan Walikota Solo Gibran Rakabuming.

Tujuh SMK yang diresmikan adalah sekolah penerima program SMK PK dengan Skema Pemadanan Dukungan tahun 2022, di mana pendanaan berasal dari DUDI dipadankan dengan pendanaan dari pemerintah. Ketujuh SMK ini adalah SMKN 4 Solo, SMKN 8 Solo, SMK Mandala Bhakti Nusantara, SMK Tunas Harapan Pati, SMKN 2 Kendal, SMKN 2 Sukoharjo, dan SMKN 3 Semarang.

Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati menyampaikan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta dunia usaha dan dunia industri (DUDI) akan menjadi kunci pendidikan vokasi yang berkualitas. "Pendidikan vokasi yang tidak hanya mampu menjawab kebutuhan DUDI, tetapi juga mampu menumbuhkan dan menggerakkan potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah-daerah dan juga di Indonesia," ujar Dirjen Vokasi (Diksi) Kiki Yuliati di SMK Negeri 8 Surakarta, pada Rabu (1/3).

Kiki menuturkan upaya untuk merevitalisasi SMK tidak akan berhenti di tahun 2023. Hal ini tidak lain untuk mencapai dua tolok ukur yang digunakan dalam menghasilkan SDM vokasi yang berkualitas dan unggul, yakni kebekerjaan lulusan, di mana para lulusan pendidikan vokasi dapat bekerja, berwirausaha, atau melanjutkan pendidikan. Tolok ukur berikutnya adalah kemitraan dengan DUDI dan pemerintah daerah. "Pendidikan vokasi diciptakan atau diselenggarakan untuk mendukung pencapaian pendidikan sekaligus mendukung rencana-rencana perkembangan dan pertumbuhan di wilayah,î kata Kiki.

Kiki juga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta atas dukungan selama ini terhadap pelaksanaan pendidikan vokasi. Pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah keterlibatan industri yang tinggi pada program SMK PK Skema Pemadanan Dukungan.

Sementara itu, Pemkot Solo telah memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan kursus dan pelatihan di berbagai lembaga kursus dan pelatihan (LKP). "Sekali lagi kami mohon dukungan dan bantuan dari Bapak/Ibu sekalian. Kami juga mohon arahan dari para pimpinan daerah, bagaimana kami bisa menyelenggarakan pendidikan vokasi yang relevan bagi pemerintah daerah dan bagi masyarakat dalam rangka mendukung perkembangan dan pertumbuhan ekonomi daerah di Indonesia," kata Dirjen Kiki. Senada dengan hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, berharap dengan adanya bantuan yang diberikan, baik berupa infrastruktur, peralatan, maupun bantuan soft program lainnya menjadi motivasi bagi para siswa dan guru dalam belajar. **(Ati)-f**

PENGHARGAAN HARUS TERUS DIJAGA

Dapatkan 'Piala' di Hati Masyarakat

MAGELANG (KR) - Memberikan apresiasi terhadap Kota Magelang yang meraih Peringkat 1 Nasional Kategori Kota dalam Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2022, unsur Ombudsman RI Pusat dan Perwakilan Jawa Tengah melakukan kunjungan ke Kota Magelang, Kamis (2/3). Rombongan dipimpin Robert Na Endi Jaweng (Anggota Pimpinan Ombudsman RI Pusat), didampingi Siti Farida (Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jateng dan jajarannya. Mereka diterima Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH dan sejumlah kepala OPD di Pendopo Pengabdian rumah dinas Walikota Magelang.

Walikota Magelang dr HM Nur Aziz SpPD K-GH dalam kesempatan ini menyampaikan rasa terima kasih atas kemitraan dan asistensi yang diberikan Ombudsman RI Pusat dan Perwakilan Jateng sehingga Pemerintah Kota Magelang berhasil meraih Peringkat 1 Nasional Kategori Kota dalam Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik tahun 2022.

Lebih spesifik, Pemerintah Kota Magelang berada pada zona hijau dengan predikat opini kepatuhan tertinggi dengan nilai kepatuhan 95,10. Capaian tersebut dinilai sangat membanggakan, mengingat di tahun 2021 Pemerintah Kota Magelang berada di zona kuning dengan nilai 61,24. "Alhamdulillah, situasi pada tahun 2021 tersebut justru menjadi lecutan semangat bagi kami semua, untuk berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik," katanya.

Walikota Magelang juga mengemukakan hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik sangat relevan dan berkorelasi dengan capaian kinerja Pemerintah Kota Magelang, di antaranya akses layanan kesehatan terjamin yakni meningkat dari 99,11 persen di tahun 2021 menjadi 99,74 persen di tahun 2022. **(Tha)-f**

KR-Thoha

Walikota Magelang berbicara di forum pertemuan.